

III. The Compensation Principle and Welfare Function

- Bab 2: Kriteria pareto utk memilih berbagai alternatif kebijakan. Namun, ada banyak kumpulan "first-best" (titik pareto-optimal) → prinsip dasar pemilihan?
- Utk mempersempit kisaran kemungkinan ke kumpulan *first-best* tunggal (distribusi pendapatan ideal) membutuhkan kriteria lebih lengkap (luas) → prinsip kompensasi (uji kompensasi Kaldor-Hicks), yg dpt dibandingkan menggunakan kriteria yg disepakati.
- Kondisi B lebih disukai drpd A jika semua individu *dimungkinkan jadi lebih baik* (tidak harus semuanya dibuat lebih baik) dgn cara redistribusi setelah perubahan kebijakan. Tdk seperti prinsip pareto, kriteria kompensasi *tidak membutuhkan (segera) pembayaran sebenarnya* utk ganti kerugian.
- Diskusi: Kompensasi sebaiknya *dibayarkan dlm kasus2 tertentu*. Lester Thurow: jika kita menginginkan perubahan ekonomi lebih cepat, diperlukan suatu sistem bantuan transisi yg baik ke individu2 yg tdk menutup kita di dlm tindakan atau institusi yg berlaku.
- *Umumnya kebijakan tdk mengharuskan kompensasi*. Misalnya *larangan pestisida* yg merugikan produsen, tapi produsen tdk dpt kompensasi.
- Meskipun sebenarnya prinsip kompensasi mengembangkan sekumpulan alternatif perbandingan (dgn adanya *kontroversi*), ada beberapa kondisi tetap tdk dpt dibandingkan.
- Kemungkinan empiris utk konsepsi teoritis yg lebih umum kelihatannya tdk jelas

3.1 Prinsip Kompensasi

- Prinsip kompensasi: *kondisi B lebih disukai drpd A jika* (dlm memindahkan dari kondisi A ke B) *yg beruntung memberi kompensasi* (mengganti kerugian) *kpd yg rugi shg tiap org jadi lebih baik*.
- Prinsip tsb berdasarkan pd *potensi kompensasi, bukan aktualnya*. Pembayaran kompensasi berkaitan dgn suatu *pertimbangan nilai*. Rekomendasi perubahan ke kondisi B berdasarkan kriteria *pareto* juga masalah subyektif (lihat Sub-bab 2.6).
- Dpt dipahami: kondisi optimal yg sebenarnya mungkin tdk dpt dicapai dg menerapkan kriteria tsb, jika perbaikan dari "*pareto* awal yg salah" dilakukan.
- Masyarakat sebaiknya pindah ke kondisi B *tanpa kompensasi utk yg dirugikan juga masalah subyektif, bahkan lebih serius*.
- Dari sisi objektif, kita *hanya dpt menunjukkan potensi superioritas* beberapa kondisi B, tanpa benar2 membuat suatu rekomendasi utk perpindahan tsb

Kasus Konsumsi Murni

- Contoh aplikasi prinsip kompensasi utk membandingkan antar distribusi (yg berbeda) sekumpulan barang, menggunakan model 2barang-2individu.
- Gb3.1: titik *a* lebih disukai drpd titik *b* berdasarkan prinsip *pareto*. Tapi bgm membandingkan titik *b* dengan titik *c*, yg diluar daerah berbentuk cerutu? *Prinsip kompensasi menawarkan satu kemungkinan*. Misalkan, seseorang meredistribusi kumpulan barang sbb, *sebagai pengganti titik b, individu A di titik d dan individu B di titik e*. Perhatikan bhw kesejahteraan masing2 tdk berubah. Tapi pd titik2 ini *ada kelebihan q_2 sebesar $(q_2^3 - q_2^2)$ dan kelebihan q_1 sebesar $(q_1^3 - q_1^2)$* . Skrg, jika perpindahan sebenarnya terjadi *ke titik c, individu A rugi dan B beruntung: individu A rugi q_2 sebesar $(q_2^2 - q_2^1)$ dan rugi q_1 sebesar $(q_1^2 -$*

q_1^1), tapi individu B beruntung memperoleh q_2 sebesar $(q_2^3 - q_2^1)$ dan q_1 sebesar $(q_1^3 - q_1^1)$. Jumlah perolehan individu B dlm q_1 dan q_2 lebih besar dari kerugian individu A. Oleh karena itu, titik c berpotensi lebih disukai drpd titik b . Berdasarkan prinsip kompensasi, tiap orang berpotensi lebih baik dg cara pindah dari titik b ke titik c karena jumlah keuntungan individu B lebih besar dari kerugian individu A. Hasil ini berlaku meskipun kompensasi sebenarnya tdk dibayarkan. Jika kompensasi dibayarkan dlm bentuk q_1 dan q_2 , akibatnya kedua pihak tidak setuju utk pindah ke titik c ; sbg gantinya, suatu perpindahan hanya terjadi hanya jika dari titik b ke daerah di dlm bentuk-cerutu. Tapi titik2 di daerah ini dpt dibandingkan dg titik b berdasarkan prinsip *pareto*. Jadi aplikasi kriteria kompensasi tdk meningkatkan kemampuan utk membuat pernyataan tentang peningkatan yg sebenarnya dlm kesejahteraan.

- Melihat masalah dg cara lain, pertimbangkan langkah individu B utk menyuap individu A spy kebijakannya pindah dari titik b ke titik c . Jumlah minimumnya q_2 sebesar $(q_2^2 - q_2^1)$ dan q_1 sebesar $(q_1^2 - q_1^1)$. Jadi, dlm keseimbangan, seseorang mungkin akan pindah dari titik b ke titik d hanya jika kompensasinya dibayar; individu B akan memperoleh q_2 sebesar $(q_2^3 - q_2^2)$ dan q_1 sebesar $(q_1^3 - q_1^2)$ dlm perpindahan tsb jika sogokan minimum dibayar. Jadi, titik c sebenarnya tidak pernah tercapai jika kompensasi dibayar.

Distribusi Kumpulan Barang yg Berbeda

- Ingat kembali bhw potensi keuntungan dpt dibuat dlm perpindahan dari titik b ke titik c jika (dlm perpindahan sebenarnya ke titik c) jumlah kerugian seseorang kurang dari jumlah keuntungan orang lain.
- Gb3.2: KI C bersesuaian dgn titik produksi di O_B dan sebarannya di titik a . Serupa dgn ini, dgn titik produksi di O_B^* , KI *Scitovsky* yang bersesuaian dg distribusi di titik b adalah C^* . Pd titik b , satu individu lebih buruk drpd di titik a , dan individu lainnya lebih baik. Tapi potensi keuntungan dpt dibuat dlm perpindahan dari titik a ke titik b krn jumlah kerugian seseorang kurang dari jumlah keuntungan orang lain. Potensi keuntungan jelas krn produksi di O_B^* dpt didistribusikan utk menjaga kesejahteraan yg sama pd titik a dg cara bergerak sepanjang Kurva Indiferen C ke titik f ; dgn melakukan ini, hf barang q_2 dan fg barang q_1 dilepas. Jadi jika prinsip kompensasi digunakan sbg kriteria kebijakan, maka perpindahan dpt dibuat (meskipun pd titik b seseorang sebenarnya mungkin lebih buruk drpd titik a).
- Skrg, suatu perbandingan dpt digambarkan antara prinsip kompensasi dan *pareto*. Menggunakan prinsip kompensasi dg titik awal produksi O_B dan distribusinya di titik a , suatu perpindahan ke titik produksi O_B^* didukung tanpa dipengaruhi bgm distribusinya. Tetapi, menggunakan prinsip *pareto* perpindahan didukung hanya jika distribusi sebenarnya berkaitan dg perpindahan sepanjang kurva indiferen C ke titik f dg menjaga kesejahteraan tiap individu sama dan kemudian membagi kelebihan fg barang q_1 dan hf barang q_2 diantara dua individu sedemikian rupa shg tdk ada yg dirugikan.
- Alasan produksi di O_B^* lebih disukai drpd di O_B adalah bhw titik awal dg distribusi pd titik a merupakan kondisi *second-best*. Kurva indiferen C yg bersesuaian bukan tangent thd KKP PP . Spt kriteria *pareto*, prinsip kompensasi tdk mendukung suatu perpindahan dari kondisi *first-best* spt produksi di O_B^* dg distribusi pd titik c yg bersesuaian dg kurva indiferen C' . jadi, kriteria

kompensasi, spt *pareto*, tdk dpt digunakan utk mengurutkan 2 kondisi *first-best*. Akan tetapi kriteria kompensasi memberikan cara membandingkan semua pasangan kondisi *second-best*, dan membandingkan semua kondisi *second-best* dgn semua kondisi *first-best*.

3.5 Ringkasan

Prinsip kompensasi dan fungsi kesejahteraan sbg alat utk membantu pembuat keputusan dlm menggunakan sumberdaya secara optimal. Prinsip tsb menyatakan bhw kondisi B lebih disukai drpd A jika (dlm memindahkan dari kondisi A ke B) yg beruntung memberi kompensasi kpd yg rugi shg tiap org jadi lebih baik. Prinsip tsb berdasarkan pd potensi kompensasi, bukan aktualnya. Sbg akibatnya, boleh jadi sebenarnya beberapa jadi lebih buruk dari suatu perubahan kebijakan, tapi perubahan tsb didukung jika yg beruntung dpt memberi kompensasi kpd yg rugi shg tiap org dpt menjadi lebih baik. Karena prinsip tsb berdasarkan potensi keuntungan (bukan sebenarnya), dua masalah muncul: Paradoks pembalikan (kerugian) dan masalah intransitivitas. Akan tetapi meskipun kriteria tsb berdasarkan potensi keuntungan, masalah tsb dapat muncul hanya jika tdk ada kumpulan *first-best* dipertimbangkan.

Konsep kurva kemungkinan utilitas dikenalkan, dan suatu kesamaan digambar antara pendekatan kemungkinan utilitas thd ekonomi kesejahteraan dengan yg berdasarkan batas kemungkinan produksi dan KI Scitovsky. Ide kriteria potensi kesejahteraan dikenalkan. Jika kriteria tsb diikuti oleh pembuat keputusan, semua kumpulan barang harus dipertimbangkan secara bersamaan dgn semua kemungkinan distribusi dari kumpulan2 barang tsb. Pendekatan ini kelihatannya tidak praktis secara empiris (meskipun akan dipertimbangkan lebih jauh dlm Sub-bab 8.3).

Karena dgn prinsip kompensasi tidak mungkin mengurutkan kumpulan2 *first-best*, konsep fungsi kesejahteraan dikenalkan. Jika fungsi spt ini ada dan disetujui, aturan optimal dpt diperoleh. Tapi krn kesepakatan ttg fungsi spt ini tdk dpt dicapai, jelaslah prinsip kompensasi yg paling dpt diterapkan, meskipun begitu kriterianya (kurang) *praktis secara empiris*. Akan tetapi salah satu masalah dgn prinsip ini adalah krn berdasarkan potensi keuntungan bukan aktualnya. Jadi dlm konteks kebijakan apa pun, pembayaran kompensasi adalah suatu masalah yg harus diputuskan oleh pembuat kebijakan yg punya otoritas utk menentukan isu distribusi pendapatan.